SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Presepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Belu

Maria Yohana Oy Tae[1], Margareth Gramediana Taolin[2], Floresita Melin Tulasi[3], Dulce Maria Gisela Saka[4], Benediktus Maurisko Geong[5], Susana Purnamasari Baso[6]
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
diantaolin@gmail.com[2], melintulasi13@gmail.com[3], dulcemariasaka@gmail.com[4], geongandre@gmail.com[5], purnamabaso@gmail.com[6]
Email Korespondensi: mayaoy409@gmail.com

Submitted: 03rd Dec 2025 | **Edited**: 24th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Tae, M. Y. O., Taolin, M. G., Tulasi, F. M., Saka, D. M. G., Geong, B. M., & Baso, S. P. (2026). Presepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Belu. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 9*(1), 192-198.

ABSTRACT

Public assessment of local government performance is closely linked to transparency and accountability in public financial management. In Belu Regency, although the local government has consistently obtained an unqualified opinion (WTP) from the Audit Board of Indonesia (BPK), public understanding of audit findings remains limited. This condition raises questions regarding how audit results influence public perceptions of government performance. This study aims to explore community perceptions of the Belu Regency Government's performance based on BPK audit results and to examine the extent to which audit information is understood and utilized by the public. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through open-ended questionnaires administered to 30 purposively selected respondents from diverse social backgrounds. The data were analyzed using thematic analysis to identify recurring patterns and key themes. The findings indicate that while most respondents recognize the importance of BPK audits in promoting transparency and accountability, their knowledge of specific audit findings is generally superficial. Public evaluations of government performance tend to rely primarily on the achievement of the WTP opinion rather than on detailed audit recommendations. Overall, the community perceives the local government's performance positively but emphasizes the need for improved dissemination of audit information and consistent follow-up on BPK recommendations to strengthen public trust.

Keywords: Public Perception, BPK Audit, Local Government Performance, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua prinsip tersebut menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi keuangan, sedangkan

akuntabilitas menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik secara terbuka dan dapat diawasi.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah diatur secara normatif melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini audit sebagai indikator kewajaran pengelolaan keuangan daerah.

Opini audit BPK, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sering kali dijadikan tolok ukur utama oleh masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP cenderung dipersepsikan telah mengelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak selalu mencerminkan keseluruhan kualitas tata kelola keuangan, terutama jika masih terdapat temuan berulang dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara optimal (Kusuma, 2019; Mardika & Pribadi, 2024).

Di Kabupaten Belu, pemerintah daerah secara konsisten memperoleh opini WTP sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, BPK masih mencatat sejumlah permasalahan administratif, khususnya terkait pengelolaan aset tetap dan ketertiban administrasi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian opini WTP belum sepenuhnya menjamin kesempurnaan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penilaian kinerja pemerintah daerah tidak hanya penting dilihat dari aspek formal audit, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memahami dan merespons hasil audit tersebut.

Persepsi masyarakat menjadi aspek penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan dan pengelolaan keuangan publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hasil audit, keterbukaan informasi, serta tindak lanjut rekomendasi BPK berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, hasil audit sering kali belum tersosialisasi secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga persepsi publik cenderung dibangun atas informasi yang bersifat umum dan terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara capaian formal audit keuangan daerah dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi hasil audit. Kesenjangan ini menjadi celah penelitian yang penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks hubungan antara hasil audit BPK dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Belu terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil audit BPK, serta mengkaji sejauh mana hasil audit tersebut dipahami dan memengaruhi penilaian publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Transparansi dalam sektor publik mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran publik. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (Setyowati & Handayani, 2020). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat dipahami oleh publik secara rasional dan objektif.

Penerapan transparansi yang efektif diyakini mampu menekan praktik penyimpangan serta meningkatkan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Namun demikian, transparansi tidak hanya diukur dari ketersediaan informasi, melainkan juga dari sejauh mana informasi tersebut disajikan secara komunikatif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah (Haryanto, 2021).

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan peran, mekanisme pelaporan, serta evaluasi kinerja yang terukur dan berkelanjutan (Nurhasanah & Prasetyo, 2019). Dalam konteks keuangan daerah, akuntabilitas tercermin melalui kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan pelaporan, serta kesediaan pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil audit.

Akuntabilitas yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas dapat menimbulkan persepsi negatif, meskipun pemerintah daerah secara formal memperoleh opini audit yang baik (Rahim & Wibowo, 2022).

Audit BPK dan Opini Audit

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen penting dalam sistem pengawasan eksternal pengelolaan keuangan negara dan daerah. Audit BPK bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah (Sutaryo & Sinaga, 2019). Hasil audit tersebut disajikan dalam bentuk opini audit, yang sering dijadikan indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, opini tersebut tidak serta-merta mencerminkan tidak adanya permasalahan dalam praktik pengelolaan keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih dimungkinkan adanya temuan berulang dan kelemahan administratif meskipun pemerintah daerah memperoleh opini WTP (Yuliani & Agustina, 2020).

Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Persepsi masyarakat merupakan hasil dari proses interpretasi individu terhadap informasi, pengalaman, dan simbol yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Persepsi ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, akses informasi, serta interaksi masyarakat dengan kebijakan dan pelayanan publik (Putra & Kurniawan, 2021). Dalam

konteks audit keuangan, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada sejauh mana hasil audit disosialisasikan dan dipahami secara substantif.

Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas terhadap isi dan implikasi hasil audit, penilaian terhadap kinerja pemerintah cenderung bersifat simbolik dan berfokus pada indikator umum, seperti perolehan opini audit. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kondisi faktual pengelolaan keuangan dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah (Lestari & Handoyo, 2023).

Kinerja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Publik

Kinerja pemerintah daerah tidak hanya dapat diukur melalui capaian administratif dan keuangan, tetapi juga melalui persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat. Kinerja yang dipersepsikan positif oleh masyarakat mencerminkan adanya kesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan program, dan kebutuhan publik. Oleh karena itu, penilaian kinerja pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dimensi objektif (hasil audit dan indikator keuangan) serta dimensi subjektif (persepsi dan kepercayaan masyarakat) secara seimbang (Widodo & Suryani, 2022).

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, penelitian ini memandang bahwa audit BPK berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tingkat keterbukaan dan tindak lanjut hasil audit akan memengaruhi persepsi masyarakat, yang pada akhirnya membentuk penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, persepsi masyarakat menjadi variabel penting yang menjembatani hubungan antara hasil audit BPK dan kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pemahaman, dan penilaian subjektif masyarakat terhadap suatu fenomena secara mendalam (Creswell & Poth, 2019). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pengumpulan data dilakukan pada awal tahun 2025.

Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berdomisili di Kabupaten Belu dan memiliki pengetahuan umum mengenai pemerintahan daerah atau pengelolaan keuangan publik. Sebanyak 30 responden yang terdiri atas mahasiswa, pelajar tingkat akhir, dan masyarakat umum dilibatkan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka yang dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada responden dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif untuk menangkap variasi perspektif secara komprehensif (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan tahapan reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari jawaban responden secara sistematis (Miles et al., 2020). Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan perbandingan jawaban antarresponden dari latar belakang yang berbeda serta diskusi antarpeneliti dalam proses interpretasi data guna meningkatkan konsistensi dan kredibilitas temuan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui keberadaan audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengetahuan tersebut umumnya diperoleh melalui media massa, media sosial, serta pemahaman umum bahwa laporan keuangan pemerintah wajib diaudit oleh lembaga negara yang berwenang. Meskipun demikian, tingkat pemahaman responden terhadap proses dan substansi audit masih bervariasi. Sebagian responden hanya mengetahui audit secara umum tanpa memahami tujuan, mekanisme, maupun isi temuan audit secara rinci.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menilai audit BPK memiliki peran penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Audit dipersepsikan sebagai alat pengawasan yang dapat mencegah penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan. Namun, ketika ditanya mengenai isi laporan hasil pemeriksaan (LHP), sebagian besar responden mengaku belum pernah membaca atau mengakses laporan tersebut secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses dan sosialisasi informasi audit masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan literasi publik terhadap hasil pemeriksaan keuangan daerah.

Dalam menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Belu, mayoritas responden memberikan penilaian yang cenderung positif. Penilaian ini terutama didasarkan pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, sebagian responden tetap menyampaikan pandangan kritis, khususnya terkait temuan berulang yang masih dilaporkan oleh BPK, seperti pengelolaan aset tetap dan ketertiban administrasi keuangan. Responden menilai bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP perlu diiringi dengan perbaikan nyata dan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, responden menyampaikan harapan agar pemerintah daerah meningkatkan keterbukaan informasi dan memperluas sosialisasi hasil audit kepada masyarakat. Responden juga menekankan pentingnya tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi BPK sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik. Harapan ini mencerminkan adanya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik di Kabupaten Belu.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran terhadap keberadaan audit BPK, pemahaman mereka terhadap substansi hasil audit masih bersifat terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Putra dan Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi publik terhadap laporan keuangan pemerintah menyebabkan penilaian masyarakat lebih didasarkan pada simbol formal, seperti opini audit, dibandingkan pemahaman terhadap temuan dan rekomendasi audit. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi belum sepenuhnya diikuti oleh keterjangkauan informasi yang efektif bagi masyarakat.

Penilaian positif masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Belu yang didasarkan pada perolehan opini WTP juga sejalan dengan hasil penelitian Yuliani dan Agustina (2020), yang menemukan bahwa opini audit sering dipersepsikan sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Namun, penelitian ini memperkuat argumen bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan yang sepenuhnya bebas dari permasalahan, terutama jika masih terdapat temuan berulang yang belum ditindaklanjuti secara optimal.

Lebih lanjut, harapan masyarakat terhadap peningkatan transparansi dan tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan bahwa persepsi publik tidak hanya dipengaruhi oleh hasil audit itu sendiri, tetapi juga oleh respons pemerintah daerah terhadap hasil pemeriksaan. Temuan ini mendukung pandangan Rahim dan Wibowo (2022) yang menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah tidak berhenti pada pencapaian opini audit, melainkan tercermin dari komitmen dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan auditor. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dan tindak lanjut audit dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Belu terhadap kinerja pemerintah daerah cenderung positif, yang terutama dipengaruhi oleh pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masyarakat pada umumnya memahami bahwa audit BPK merupakan instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap substansi hasil audit dan rekomendasi BPK masih terbatas, sehingga penilaian kinerja pemerintah daerah lebih banyak bertumpu pada indikator formal daripada pemahaman mendalam terhadap temuan audit.

Keterbatasan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya diikuti oleh keterjangkauan informasi yang efektif bagi masyarakat. Meskipun memperoleh opini audit yang baik, pemerintah daerah masih perlu memperhatikan temuan berulang, khususnya terkait pengelolaan aset dan ketertiban administrasi keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan formal dalam audit perlu diimbangi dengan perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan keuangan serta respons yang konsisten terhadap rekomendasi BPK agar akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas komunikasi publik dan sosialisasi hasil audit kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian opini audit, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara nyata. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian akuntabilitas sektor publik dengan menekankan peran persepsi masyarakat sebagai elemen penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara literasi publik, hasil audit, dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andriana, D. (2025). *Akuntabilitas publik*. Deepublish.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dwi, B., Pitaloka, G., Carolina, A., & Abrori, R. (2022). Peran sistem integritas, sistem pengendalian internal, kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 18(2), 143-154.

Haryanto. (2021). Transparansi keuangan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 145-158.

Kusuma, A. R. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(1), 403-420.

Lestari, D., & Handoyo, S. (2023). Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah berbasis akuntabilitas keuangan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 67-80.

Mardika, I. H., & Pribadi, R. M. (2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Liquidity*, 13(2), 135-148.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Nurhasanah, S., & Prasetyo, E. (2019). Akuntabilitas keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(2), 89-101.

Paridy, A., Judijanto, L., Masri, M., Deswindi, L., Wati, C. N., Firmansyah, M., & Tjahyanti, S. (2021). *Perilaku organisasi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Pratama, R., & Nugroho, A. (2020). Transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 101-112.

Putra, A. R., & Kurniawan, D. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 201-214.

Rahim, A., & Wibowo, T. (2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 9(1), 33-47.

Rahman, F., & Setiawan, B. (2021). Peran audit sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(1), 45-58.

Sari, M., & Lestari, E. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah berbasis akuntabilitas keuangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 221-233.

Setyowati, R., & Handayani, N. (2020). Transparansi anggaran dan penguatan pengawasan publik di daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(2), 120-133.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sutaryo, & Sinaga, D. (2019). Peran audit BPK dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 4(1), 1-15.

Widodo, A., & Suryani, L. (2022). Kinerja pemerintah daerah dalam perspektif kepuasan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2), 98-110.

Yuliani, S., & Agustina, R. (2020). Opini audit dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Publik*, 3(1), 55-69.